



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
**RUMAH DETENSI IMIGRASI
MAKASSAR**

Jalan Lembaga Bolangi, Gowa
92171
Telepon : (62) 812-1111-4660

Laman : www.rudenimakassar.kemerkumham.go.id
Surel : rdnm.makassar@kemerkumham.go.id

29 Desember 2023

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Selatan Di Makassar

SURAT PENGANTAR
Nomor : W.23.IMI.IMI.4-PR.03-4347

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan LKjIP Semester II Tahun 2023	1 rangkap	-

Diterima tanggal.....

Penerima

.....
NIP

No. Telepon :



Pengirim
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Atang Kuswana

NIP 196706151995031002



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

Rumah Detensi Imigrasi Makassar

20
23

Semester 2



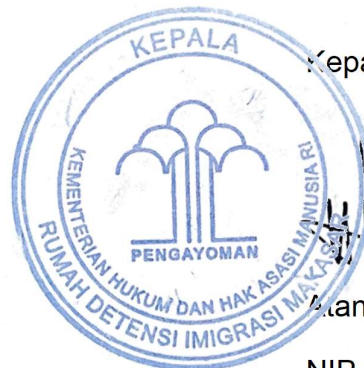
KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Penyusunan LKjIP ini, juga merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang memuat capaian-capaian dari target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) Semester. LKjIP ini diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Selain itu, Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kanwil Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang.

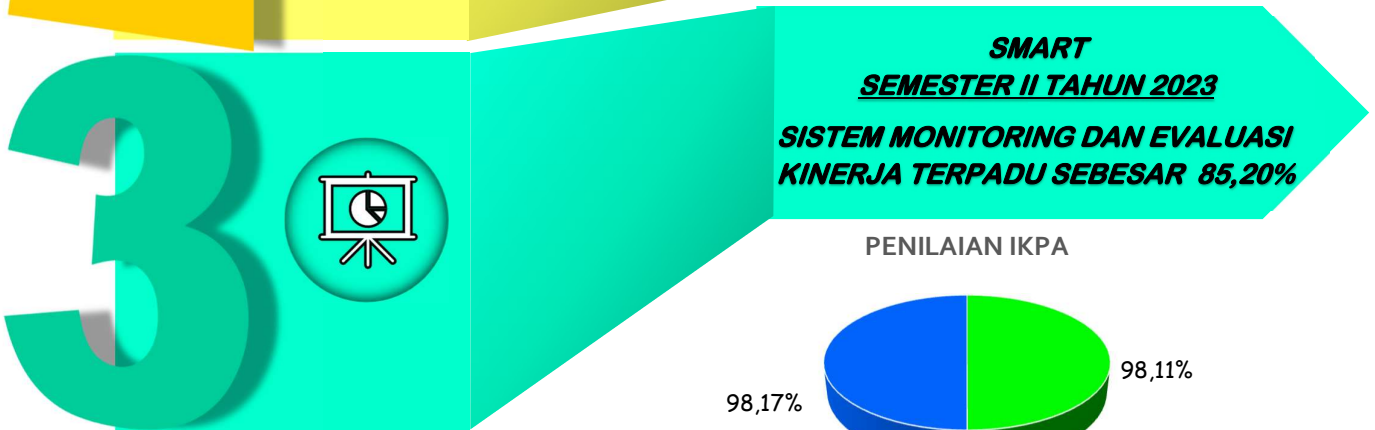


Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

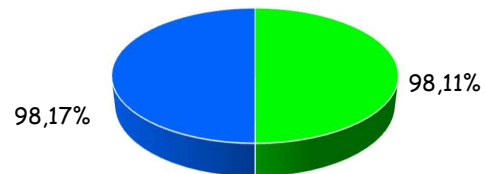
Ang Kuswana

NIP 196706151995031002

IKHTISAR EKSEKUTIF



PENILAIAN IKPA



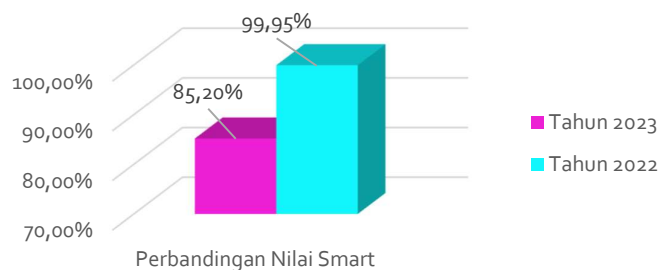
■ Tahun 2023 ■ Tahun 2022

REALISASI ANGGARAN



■ Tahun 2023 ■ Tahun 2022

PENILAIAN SMART



Perbandingan Nilai Smart



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Rumah Detensi Imigrasi kepada publik dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Semester II Tahun 2023 merupakan perwujudan dari akuntabilitas capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama 6 (enam) bulan terakhir tahun 2023, untuk menggambarkan serta mendorong transparansi capaian kinerja terhadap berbagai sasaran strategi sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kinerja berikut permasalahan dan sejumlah hal yang memerlukan perbaikan dan juga merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. hal tersebut sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang terdiri dari:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Tabel : Total Pagu Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Semester I 2023

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.420.804.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.420.804.000,-



Tabel : Total Pagu Rumah Detensi Imigrasi Makassar Periode Semester II 2023

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.500.817.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.500.817.000,-

Pada Semester I Tahun 2023, Rumah Detensi Imigrasi Makassar memperoleh Pagu sebesar **Rp.8.072.398.000**, dan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk Program pelayanan serta penegakan Hukum dan Dukungan Manajemen di Rumah Detensi Imigrasi Makassar, memasuki Semester II Tahun 2023 Rumah Detensi Imigrasi memperoleh ABT Tahap I Sebesar **Rp. 1.118.125.000** serta memperoleh lagi ABT Tahap II pada bulan Oktober sebesar **Rp. 721.024.000** dan memperoleh lagi penambahan ABT belanja Pegawai sebesar **Rp. 240.864.000**, Selama Semester II Tahun 2023, dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target realisasi anggaran, dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada semester II Tahun 2023 memperoleh Total pagu sebesar **Rp. 10.152.411.000** dan telah berhasil direalisasikan sampai bulan Desember Tahun 2023 sebesar **Rp. 10,139,202,185** (99,87%). Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas dengan tetap berlandaskan tata nilai “PASTI” yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama enam bulan ini telah melakukan beberapa kegiatan keimigrasian antara lain Pendetensian, Resettlement, Pindahan antar Rudenim, Deportasi, serta melakukan kegiatan pengawasan dan penanganan pengungsi dari luar negeri yang melibatkan langsung masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi dalam rangka penanggulangan masalah-masalah pengungsi dari luar negeri yang sering terjadi di lingkungan masyarakat.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ikhtisar Eksekutif.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	viii
BAB I Pendahuluan	2
Latar Belakang	2
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	4
Maksud dan Tujuan.....	10
Aspek Strategis.....	10
Isu Strategis.....	10
Sistematika Laporan.....	12
BAB II Perencanaan Kinerja	11
Rencana Strategis.....	12
Perjanjian Kinerja	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	19
Capaian Kinerja Organisasi.....	19
Realisasi Anggaran	35
Capaian Kinerja Anggaran	36
Capaian Kinerja Lainnya.....	38
BAB IV Penutup.....	37
Kesimpulan	37
Saran.....	37
LAMPIRAN	39



Daftar Tabel

Tabel I.1	Jumlah Pegawai.....	9
Tabel I.2	Jenis Kelamin.....	9
Tabel I.3	Klasifikasi Golongan.....	9
Tabel I.4	Klasifikasi Pendidikan.....	10
Tabel II.1	Perjanjian Kinerja.....	16
Tabel II.2	Kegiatan dan Anggaran	16
Tabel III.1	Pencapaian Sasaran Kegiatan.....	19
Tabel III.2	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023.....	19
Tabel III.3	Perbandingan Hasil Survey IKM Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023.....	21
Tabel III.4	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2023.....	22
Tabel III.5	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023	23
Tabel III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.....	23
Tabel III.7	Capaian Tindakan Administrasi Keimigrasian Semester II Tahun 2023...	26
Tabel III.8	Perbandingan Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023	26
Tabel III.9	Capaian Indeks Kepuasan Semester II Tahun 2023	26
Tabel III.10	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023	27
Tabel III.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	27
Tabel III.12	Jumlah Warga Negara Asing yang di Detensi Rudenim Makassar Selama Semester II Tahun 2023	28
Tabel III.13	Jumlah Pengawasan Selama Semester II Tahun 2023	29
Tabel III.14	Kegiatan Rapat Rudenim Makassar Semester II Tahun 2023.....	29



Tabel III.15	Hasil Indeks Kepuasan Internal Semester II Tahun 2023.....	33
Tabel III.16	Capaian Indeks Kepuasan Semester II Tahun 2023.....	33
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Internal Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023.....	34
Tabel III.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.....	34
Tabel III.19	Serapan Anggaran.....	35
Tabel III.20	Perbandingan Serapan Anggaran.....	36
Tabel III.21	Penyerapan Anggaran Per Jenis Kegiatan.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Rumah Detensi Imigrasi Makassar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas di bidang keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.01 Tahun 2004 dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian Orang asing, selain itu Rumah Detensi Imigrasi Makassar mendapatkan tugas tambahan dibidang pengawasan terhadap pengungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup 1. *Pembangunan Sumber Daya Manusia (Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan Kerjasama industri dan talenta global)*, 2. *Pembangunan Infrastruktur (Melanjutkan Pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendokrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat)*, 3. *Penyederhanaan Regulasi (Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, undang-undang cipta lapangan kerja, kedua, undang-undang pemberdayaan UMKM)*, 4. *Penyederhanaan Birokrasi (Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi)* dan 5. *Transformasi Ekonomi (Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia)*.

Sebagai bagian dari instansi vertikal pemerintah, Rumah Detensi Imigrasi Makassar wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Hukum Keimigrasian.

Luas Wilayah Kerja Rudenim Makassar meliputi :

Sulawesi selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara



B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Keimigrasian dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan. Tugas Rudenim yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian orang asing.



Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi Pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, memiliki 1 Sub Bagian dan 3 Seksi yaitu:



1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, dan Rumah Tangga Rudenim berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- b. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda pribadi, serta melakukan pemulangan terdetensi dan pelaporannya, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumen sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Registrasi
Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi,



membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi.

b. Sub Seksi Administrasi

Sub Seksi Administrasi, mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

3. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Seksi Perawatan dan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Seksi perawatan dan Kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok/ Fungsinya dan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan ketertiban mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keamanan dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:



- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan rudenim;
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi Keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

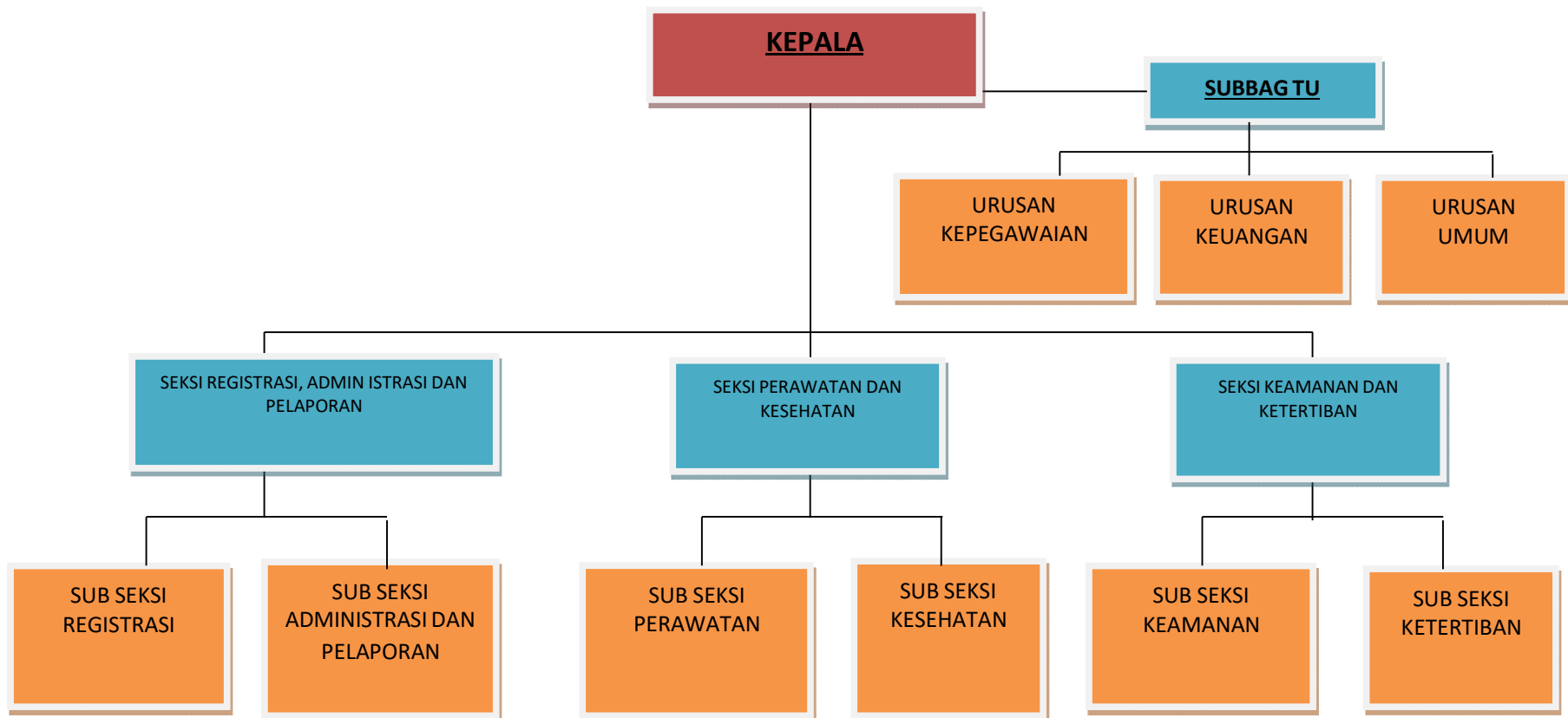
- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan rudenim;
- b. Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Dibawah ini merupakan bagan susunan struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M – 01.PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 9 Maret 2004). yang mencakup :

- Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar
- Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi: Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian dan Urusan Umum
- Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan yang meliputi: Sub Seksi Registrasi dan Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan
- Seksi Keamanan dan Ketertiban yang meliputi: Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Ketertiban
- Seksi Perawatan dan Kesehatan yang meliputi : Sub Seksi Perawatan dan Sub Seksi Kesehatan



STRUKTUR ORGANISASI RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR



Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Rumah Detensi Imigrasi Makassar didukung sumber daya manusia sebanyak 63 (enam puluh tiga) Orang Pegawai, dengan komposisi sebagai berikut

Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai

No.	Nama Bagian	Jumlah (Orang)
1	Karudenim	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	19
3	Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan	11
4	Seksi Keamanan dan Ketertiban	23
5	Seksi Perawatan dan Kesehatan	9
Jumlah		63

Tabel 1.2 : Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Pria	49
2	Wanita	14
Jumlah		63

Tabel 1.3 : Klasifikasi Golongan

No.	Klasifikasi Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	22
3	Golongan II	38
Jumlah		63

Tabel 1.4 : Klasifikasi Pendidikan

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	3
2	SI	19
3	SMA	41
Jumlah		63

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang diberi kepercayaan atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan Pelaporan Kinerja:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis

1. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.
2. Mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
3. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.
4. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Rumah Detensi Imigrasi Makassar seringkali



dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan dapat menghambat pencapaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dengan rincian sebagai berikut:

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
SUBBAG TU	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya jumlah SDM2. Pengarsipan dokumen kepegawaian belum sesuai kaidah kearsipan3. Terdapat Pejabat Struktural yang belum mengikuti pelatihan Diklat Kepemimpinan (DIKLATPIM)4. Kurangnya jumlah pelatihan tentang kepegawaian5. kekurangan pagu untuk alokasi belanja Pegawai6. Postur RKA-K/L sering mengalami perubahan7. Belum tertibnya pencatatan Barang Milik Negara8. Rendahnya kemampuan SDM pelaksana/pengelola Keuangan dan Perlengkapan dalam hal pelaksanaan/pertanggungjawab an anggaran dan Penatausahaan BMN9. Integrasi penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) belum maksimal10. Penerimaan surat melalui Emai masuk (rudenmks@yahoo.co.id) sering tidak dibuka oleh staf11. Belum dan yang lulus diklat Bendaharawan12. Pengisian LHKSN Pegawai belum optimal13. Prasarana Utama (laptop) yang digunakan untuk keperluan Rekonsiliasi BMN (SIMAN) tidak optimal14. Lambatnya jaringan internet (server) untuk unduh surat masuk dari e-mail15. Proses kaderisasi kurang, sehingga Ketika seorang pegawai mengisi jabatan baru, pengetahuan tentang jabatan barunya masih sangat kurang16. Pemeliharaan kendaraan roda 4 tidak maksimal yang diakibatkan oleh rendahnya anggaran pemeliharaan

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
Seksi Req. Admin dan Laporan	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Jumlah SDM2. Tidak terlaksananya integrasi aplikasi e-office (aplikasi Rudenim)3. Aplikasi Simkin yang diharapkan bisa memudahkan migrasi data pengungsi luar negeri, ternyata tidak optimal dan sering mengalami error4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas5. Pengungsi masih banyak yang belum menggunakan aplikasi E-motion yang pembuatan diharapkan meminimalisir pengungsi untuk datang langsung ke Rudenim sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi, akibatnya aduan dan wajib lapor pengungsi setiap bulannya masih dilakukan pengungsidengan7. cara mengunjungi Rudenim yang membuat pengungsi mengeluarkan biaya transportasi Pengiriman surat yang sifatnya penting tidak terkordinir dengan cepat.8. Beberapa staf belum terlalu mahir menjalankan aplikasi-aplikasi yang dioperasikan melalui PC



SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN
Seksi Perawatan dan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tidak memadainya peralatan kesehatan2. Tingginya Tingkat stress diakibatkan ketidakjelasan waktu pendeportasian
Seksi Kemanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya Sarana dan Prasarana pendukung utama.2. Masih apatisnya seksi lain terhadap penanganan deteni dan imigratoir, sehingga melimpahkan tanggung jawab penanganan deteni dan imigratoir hanya ke seksi keamanan dan ketertiban

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH-01.PR.03 TAHUN 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

KATA PENGANTAR : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar semester II tahun 2023

BAB I : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, aspek strategis, isu strategis, dan sistematika laporan



BAB II

: PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Informasi tentang perencanaan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang menyajikan rencana strategis organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta Perjanjian Kinerja yang menyajikan dokumen untuk melaksanakan kegiatan yang disertai indikator kinerja berdasarkan anggaran yang telah disetujui

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan analisis pencapaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja serta analisis capaian kinerja keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar

BAB IV

: PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Selama Semester II Tahun 2023 beserta saran untuk perbaikan di masa mendatang

Lampiran

- :** • Perjanjian Kinerja tahun 2022
- Perjanjian Kinerja tahun 2023
- Prestasi dan Penghargaan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan, Penetapan dan Perjanjian
Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Rumah Detensi Imigrasi Makassar berkomitmen terus memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas instansi Pemerintah bukan hanya melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat salah satunya standar pelayanan publik yang berkualitas.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar terus memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan dan profesional, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Detensi Imigrasi Makassar terus berbenah untuk menjadi lebih baik, dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi Keimigrasian, memudahkan warga negara asing (Deteni) untuk memperoleh informasi dari kedutaan serta keluarganya dan memudahkan kelengkapan dokumen warga negara asing dalam rangka pemulangan/deportasi, semua bentuk pelayanan ini sebagai perwujudan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai Berikut :

VISI

“ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi

1. Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas;
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia;

5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian hukum dan hak asasi manusia; dan
6. Mewujudkan aparatur kementerian hukum dan hak asasi manusia yang professional dan berintegritas.

- **Tata Nilai**

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;

Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;

Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;

Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *core values* ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- Ber** orientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- A** kuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan jabatan;
- K** ompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- H** armonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- L** oyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara;
- A** daptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif;
- K** olaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

• Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah penggambaran dari pelaksanaan visi dan misi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi antara lain :

1. Mewujudkan aparatur keimigrasian yang semakin akuntabel, professional, transparan serta inovatif ;
2. Terwujudnya penegakan hukum yang adil kepada semua masyarakat;
3. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik dan prima;
4. Terwujudnya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
5. Terwujudnya keamanan masyarakat terhadap lalu lintas orang asing;
6. Terwujudnya kemudahan dalam mengakses informasi keimigrasian;

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka pelaksanaan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2023 pada Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020- 2024, khususnya pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, terkendala oleh beberapa hal yakni:

1. Belum sepenuhnya dipahami Sasaran Kinerja dan Indikator kinerja Utama dengan capaian output program;
2. Penanganan pengungsi di Indonesia masih lemah, hal ini disebabkan payung hukum penanganan pengungsi masih belum mempunyai juklak dan juknis;
3. Orta Rudenim masih menggunakan orta lama;
4. Tumpang tindih tugas dengan Kantor Imigrasi; dan
5. Terjadinya pelanggaran oleh Pengungsi yang penanganannya diserahkan ke Rumah Detensi, hal ini dapat menyebabkan persoalan hukum, mengingat bahwa Deteni adalah Orang Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan akan ditempatkan sementara pada Rumah Detensi.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki 3 Sasaran Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada 3 program. Sasaran kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Divisi Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan frame work pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu guna mewujudkan Rumah Detensi Imigrasi Makassar memperoleh predikat Wilayah bebas Korupsi, dilakukan berbagai upaya dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terkait.

Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Detensi Imigrasi Makassar yakni Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yang secara struktural organisasi bertanggungjawab terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sulawesi Selatan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Sehingga berdasarkan struktur organisasi tersebut terjadi keterkaitan satu sama lain, rencana strategis kementerian Hukum dan HAM merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar Merupakan perwujudan Komitmen Bersama untuk peningkatan kinerja pada jajaran satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

Tabel 2.1: Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Tabel 2.2: Kegiatan dan Anggaran

Pagu Anggaran Semester I Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-

Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.420.804.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.420.804.000,-

Pagu Anggaran Semester II Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 8.500.817.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 8.500.817.000,-
Jumlah	Rp. 10.152.411.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan pencapaian kinerja unit pelaksana teknis Rumah Detensi Imigrasi Makassar, dengan menjelaskan berbagai pencapaian kinerja organisasi selama semester II Tahun 2023 beserta analisisnya. Pengukuran Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran Kegiatan.

Tabel III.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Status
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan keimigrasian	3,25	3,88	
	Indeks pengamanan keimigrasian	3,13	3,54	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah	Indeks kepuasan internal	3,13	3,65	

Tabel III.2 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 Semester II

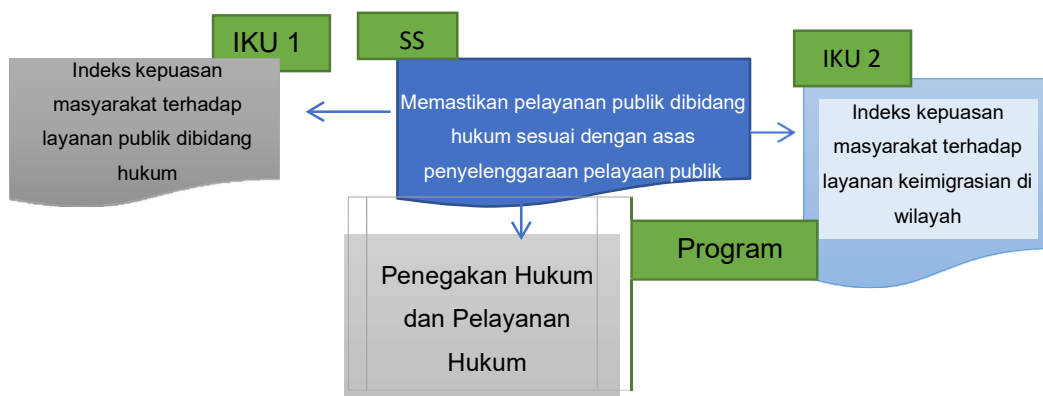
Kinerja Keuangan Rumah Detensi Imigrasi Makassar	TAHUN 2022	Tahun 2023 Semester II
PAGU	6.952.000.000	10.152.411.000
REALISASI	6.935.880.438	10.139.202,185
CAPAIAN	(99.77%)	(99.87%)

Seluruh capaian tabel di atas akan dijabarkan per sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yaitu:

SASARAN KEGIATAN
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian

Penilaian indeks kepuasan masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023 adalah Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan Keimigrasian yang dilakukan dan telah memberikan kepuasan bagi *stakeholders*, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan *stakeholders* berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan *stakeholders*.

Survei kepuasan pengguna layanan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi *survei.balitbangham.go.id* yang metode pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.





Tabel III.3 Tabel Perbandingan hasil survey IKM Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

**RUDENIM MAKASSAR
TAHUN 2022**

NO	UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Informasi	3,77	3,87	3,95	3,94	3,90	3,58	4	3,82	3,93	4	3,80	4
2	Persyaratan	3,75	3,83	3,94	3,94	3,89	3,61	4	3,88	3,93	3,91	3,90	3,85
3	Prosedur/ Alur	3,80	3,83	3,95	3,94	3,88	3,61	4	3,88	3,93	3,95	3,90	3,93
4	Waktu Penyelesaian	3,86	3,85	3,91	3,92	3,86	3,50	4	3,88	3,93	3,95	3,85	3,85
5	Tarif/ Biaya	3,83	3,81	3,92	3,96	3,86	3,53	4	3,88	3,87	4	3,85	3,93
6	Sarana/ Prasarana	3,88	3,83	3,94	3,94	3,88	3,56	4	3,88	3,93	3,95	3,85	3,85
7	Respon	3,85	3,81	3,94	3,90	3,89	3,61	4	3,88	3,87	3,95	3,80	3,93
8	Konsultasi/ Pengaduan	3,85	3,79	3,92	3,92	3,86	3,58	4	3,88	3,87	3,95	3,85	3,85
9	Nilai SKM	3,82	3,83	3,93	3,93	3,88	3,57	4	3,87	3,91	3,96	3,85	3,90
10	Responden	39	32	39	29	48	23	4	10	9	13	12	8

NO	Unsur Layanan	Nilai
1	Informasi	3,88
2	Persyaratan	3,87
3	Prosedur/ Alur	3,88
4	Waktu Penyelesaian	3,86
5	Tarif/ Biaya	3,87
6	Sarana/ Prasarana	3,87
7	Respon	3,87
8	Konsultasi/ Pengaduan	3,86
9	Nilai SKM	3,87
10	Responden	266

**RUDENIM MAKASSAR
TAHUN 2023**

NO	UNSUR LAYANAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Informasi	3,84	3,81	3,93	3,82	3,82	3,94	3,96	3,94	3,88	3,83	3,95	3,94
2	Persyaratan	3,80	3,85	3,91	3,78	3,84	3,91	3,88	3,89	3,86	3,81	3,95	3,96
3	Prosedur/ Alur	3,84	3,79	3,89	3,80	3,81	3,93	3,88	3,92	3,90	3,85	3,92	3,96
4	Waktu Penyelesaian	3,88	3,76	3,91	3,80	3,81	3,88	3,90	3,89	3,84	3,83	3,94	3,91
5	Tarif/ Biaya	3,92	3,87	3,89	3,78	3,81	3,96	3,90	3,91	3,94	3,87	3,92	3,93
6	Sarana/ Prasarana	3,88	3,79	3,87	3,76	3,86	3,96	3,88	3,89	3,88	3,83	3,94	3,94
7	Respon	3,92	3,79	3,89	3,85	3,86	3,90	3,94	3,92	3,84	3,87	3,90	3,96
8	Konsultasi/ Pengaduan	3,92	3,79	3,91	3,76	3,84	3,90	3,88	3,88	3,88	3,85	3,89	3,94



9	Nilai SKM	3,88	3,80	3,90	3,80	3,83	3,92	3,90	3,91	3,88	3,84	3,93	3,94
10	Responden	15	28	32	33	34	41	30	39	30	32	37	41

NO	Unsur Layanan	Nilai
1	Informasi	3,89
2	Persyaratan	3,87
3	Prosedur/ Alur	3,87
4	Waktu Penyelesaian	3,86
5	Tarif/ Biaya	3,89
6	Sarana/ Prasarana	3,87
7	Respon	3,89
8	Konsultasi/ Pengaduan	3,87
9	Nilai SKM	3,88
10	Responden	392

Tabel III.4 Tabel capaian indeks kepuasan Masyarakat Semester II tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan keimigrasian	3,25	3,88	119 %

Rumus Capaian:

% Capaian =	Indeks Kepuasan layanan keimigrasian	x	100%	
	Target Kepuasan Layanan Keimigrasia			
=	$\frac{3.88}{3.25}$	x	100%	
=	119%			

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023
Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap layanan keimigrasian	3,21	3,25	3,87	3,88	120 %	119%

Capaian IKM terhadap layanan Keimigrasian di wilayah Tahun 2022 sebesar 3,87 dari target 3,21 atau sekitar 120% sedangkan untuk semester II Tahun 2023 sebesar 3,88 dari target 3,25 atau sekitar 119%, Realisasi yang dicapai pada Tahun 2022 maupun Semester II Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, Target Semester II tahun 2023 telah terlampaui, Target kinerja untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah tahun 2021 adalah 3,81 dari target 3,15, Target kinerja untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah tahun 2022 adalah 3,87 dari target 3,21, Target kinerja untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah Semester II tahun 2023 adalah 3,88 dari target 3,25 dan Target kinerja untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah tahun 2024 adalah 3,31

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.15	3.21	3.25	3.31

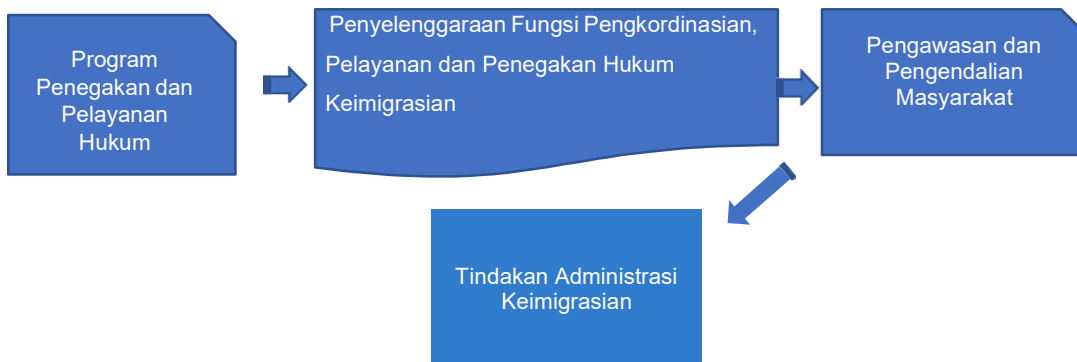
Analisis :

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Makassar Pada Semester II tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan. Banyak hal yang telah dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Makassar sehingga target indeks kepuasan masyarakat dapat tercapai. Rumah Detensi Imigrasi Makassar tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima. Selain itu hal-hal yang menunjang pencapaian target adalah:

- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penanganan pengungsi Satgas PPLN di Kota Makassar;
- 2) Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pemilik *Community House (CH)* sebagai tempat penampungan pengungsi yang semakin baik, dalam hal adanya saling tukar informasi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi;
- 3) Penyebaran informasi seluruh kegiatan secara rutin oleh TIM Humas dengan memanfaatkan website dan media sosial secara optimal Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yang dilaksanakan secara intens kepada masyarakat.
- 4) Semakin Mudahnya Pengungsi dari Luar Negeri melakukan peneraan kartu pengungsi setiap bulan karena tidak perlu lagi harus datang ke Rudenim makassar cukup buka aplikasi e-Motion berbasis web, aplikasi ini di peruntukkan kepada pengungsi yang berada di kota Makassar, e-motion bertujuan agar pengungsi dapat melakukan peneraan kartu pengungsi setiap bulan, hal tersebut merupakan perwujudan kewajiban lapor diri pengungsi setiap bulan ke Rudenim Makassar yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain itu, aplikasi ini juga memangkas jarak tempat tinggal pengungsi yang tidak berada satu kota dengan Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yaitu jarak Lapor diri, Melakukan Pengaduan, bahkan permintaan pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh pengungsi yang berkaitan dengan Tugas Rudenim.

SASARAN KEGIATAN Indeks Pengamanan Keimigrasian

Pengukuran capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan fungsi pengamanan keimigrasian diwilayah Semester II Tahun 2023.



Tindakan Pengamanan Keimigrasian bertujuan untuk mendeteksi secara dini dan Upaya pencegahan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terlaksananya fungsi keimigrasian. Tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada seperti pengumpulan informasi, pengolahan informasi dan penindakan keimigrasian, seluruh Tindakan ini digunakan untuk pencegahan terhadap hambatan-hambatan yang akan timbul di bidang keimigrasian, karena kelalaian, kealpaan, hingga pengabaian yang dilakukan aparaturnya Rumah Detensi Imigrasi Makassar sebagai salah satu unit pelaksana teknis yang turut serta melaksanakan tugas pengamanan keimigrasian dimana hal negatif tersebut apabila dibiarkan akan menyebabkan fungsi keimigrasian menjadi terhambat atau dapat menimbulkan pelanggaran, kejahatan keimigrasian, maupun tindak pidana baik tindak pidana keimigrasian maupun tindak pidana umum.

Tabel III.7 capaian Tindakan Administrasi Keimigrasian Semester II Tahun 2023

Kegiatan	Sub kegiatan	target	realisasi	capaian
Pengawasan dan Penindakan	Tindakan administrasi keimigrasian	10	11	110 %
% =	Realisasi Pengamanan Keimigrasian	X	100%	
	Target Pengamanan Keimigrasian			
% =	11	X	100%	
	10			
=	110%			

Tabel III.8 Perbandingan Tindakan Administrasi Keimigrasian Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023
Tindakan administrasi keimigrasian	6	10	59	11	983%	110 %

Tabel III.9 Tabel capaian indeks kepuasan Semester II Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi Semester II	Capaian
Indeks pengamanan keimigrasian	3,13	3,54	113%

Rumus Capaian:

% Capaian =	realisasi pengamanan keimigrasian	X	100%	
	target pengamanan keimigrasian			
=	3.54	X	100%	
	3.13			
=	113%			

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.10 Perbandingan capaian indeks kepuasan Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023
Indeks pengamanan keimigrasian	3,12	3,13	3,88	3,54	124%	113%

Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian Tahun 2022 sebesar 3.88% dari Target 3.12% dan Semester II Tahun 2023 sebesar 3,54% dari Target 3.13%, Realisasi yang dicapai pada Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023 telah melampaui dari target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, Target Semester II tahun 2023 telah terlampaui , Target kinerja untuk indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah tahun 2023 adalah 3.13, sedangkan Target kinerja untuk indeks pengamanan keimigrasian di wilayah tahun 2024 adalah 3.14, Realisasi indeks pengamanan keimigrasian Tahun 2022 adalah 3.88, sedangkan Realisasi semester II Tahun 2023 adalah 3.54.

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

Analisis :

Pelaksanaan kegiatan pengamanan keimigrasian berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian kepada Deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Dari capaian di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Sepanjang Semester II Tahun 2023 telah dilakukan Pendetensian Sebanyak 11 (sebelas) orang merupakan Warga Negara asing yang melakukan pelanggaran

dokumen keimigrasian dan Pelanggaran Tata Tertib Lainnya, sesuai tabel, yaitu;

Tabel III.12 Jumlah Warga Negara Asing yang di Detensi Rudenim Makassar selama semester II tahun 2023

No	Jumlah Deteni	Warga negara
1.	5	Afghanistan
2.	1	Iran
3.	3	Nigeria
4.	1	Myanmar
5.	1	AfseI
Total	11	-

- Tingginya jumlah capaian pelaksanaan kegiatan TAK Pendetensian di Semester II Tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - ✓ Meningkatnya jumlah pelanggaran oleh pengungsi di kota makassar disebabkan oleh tingginya tingkat kejenuhan pengungsi;
 - ✓ Rata-rata waktu pengungsi di Indonesia lebih dari 5 Tahun;
 - ✓ Adanya pembatasan aktifitas bekerja, Rekreasi bagi Pengungsi, dan berkendara;
 - ✓ Adanya gesekan sesama pengungsi yang diakibatkan tingginya tingkat stres, dan perbedaan kultur budaya pengungsi, hal tersebut timbul akibat penempatan Tempat Tinggal (*Commnuty House*) pengungsi dari berbagai negara dalam 1 tempat tinggal;
 - ✓ Meningkatnya Jumlah Pengiriman Imigratoir dari Kantor Imigrasi yang Masuk Wilayah Kerja Rudenim Makassar maupun yang tidak masuk Wilayah Kerja Rudenim Makassar.

- Jumlah pengawalan sebanyak 189 orang oleh Petugas Selama Semester II Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pegawai/Pejabat Rudenim Makassar, dengan perbandingan jumlah pengawalan 1:2 yaitu 1 (satu) orang Deteni/Pengungsi di kawal oleh 2 (dua) orang Petugas;

Tabel III.13 Jumlah Pengawalan Selama Semester II Tahun 2023

No	Jumlah pengawalan	Keterangan pengawalan	Warga negara
1.	6	AVR (Refugee)	Srilangka
2.	147	Resettlement	Afganistan,Sudan, Myanmar,Ethiopia,Pakistan, Somalia,Irak, Iran
3.	25	Pemindahan Dari Rudenim Makassar	Afghanistan,Somalia
4.	11	Deportasi	Nigeria dan Nepal

- Pada Semester II Tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan Rapat yang bertujuan sebagai bagian dari pengamanan keimigrasian. Dengan Uraian sebagai berikut :

Tabel III.14 Kegiatan Rapat Rudenim Makassar Semester II Tahun 2023

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1.	Kegiatan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar dengan Peserta terdiri dari Kesbangpol Kota Makassar, Polrestabes Makassar, UNHCR, IOM, Kemenkopolhukam, Kesbangpol Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, Kodam XIV/Hasanuddin dan POK Ahli Keimigrasian, kegiatan ini dibuka oleh Ketua Harian Satgas PPLN Pusat Bapak Brigjen Pol Dr. Bambang Pristiwanto	17 Juli 2023
2.	Kegiatan Rapat Operasi Gabungan Bersama Polres Gowa, Polantas dan Intel Polisi Gowa, Kegiatan dibuka oleh Karudenim Makassar yang menjelaskan jumlah pengungsi dan regulasi pengungsi, sementara dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Kanit Gakkum Lantas dari Polsek Parangloe, Perwakilan dari Polres Gowa dan Kapolsek Parangloe, yang menyampaikan agar dalam operasi gabungan nanti pembagian titik-titik operasi di utamakan tempat-tempat keramaian yang sering di datangi seperti kafe, warkop dan	20 Juli 2023

	tempat rekreasi serta menyasar jalan-jalan yang sering dilalui oleh pengungsi untuk berlibur dan keluar dari kota makassar	
3.	Kegiatan Diskusi Satgas PPLN Kota Makassar Menyongsong Pemilu Tahun 2024 “Peran Satgas PPLN dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar” yang dibuka oleh Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Kegiatan dihadiri oleh satuan tugas PPLN, Divisi Keimigrasian, Kanim Kelas I Makassar, Kesbangpol, IOM, UNHCR, Kepolisian, Camat dan KPU dalam diskusi ini diusulkan penerbitan Surat Edaran Walikota Makassar terkait Antisipasi Permasalahan yang diakibatkan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar Menghadapi Pemilu 2024 yang dapat dijadikan dasar penanganan pengungsi selama pemilu 2024	28 Juli 2023
4.	Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar yang bekerja, Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, kegiatan ini dihadiri oleh Satgas PPLN Kota Makassar yang terdiri dari Kesbangpol Kota Makassar, Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, dan Dinsos Kota Makassar, kegiatan ini bertujuan mencari Solusi dari maraknya pengungsi yang bekerja tanpa izin dari Rudenim Makassar.	18 Agustus 2023
5.	Kegiatan Rapat Koordinasi melalui Zoom yang diikuti oleh Rudenim Makassar, Kedutaan Besar Nepal di Kuala Lumpur, Sat Reskrim Polres Tanimbar dan Konsulat Nepal di Jakarta, Rapat ini diadakan agar pihak Rudenim Makassar menunda Deportasi warga negara Nepal yang ada di Rudenim karena bersatus saksi dalam kasus TPPO yang terjadi di Tanimbar	23 Agustus 2023

6.	<p>Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar yang Mengendarai Kendaraan Bermotor tanpa Memiliki SIM, Rapat dibuka oleh Ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, Kegiatan ini dihadiri oleh Kasatgas PPLN Kota Makassar, Satintelkam Polrestabes Makassar, Satlantas Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, Kesbangpol Kota Makassar dan Dinsos Kota Makassar, yang membahas persoalan banyaknya pengungsi yang mengendarai motor tanpa Sim dan mencari Solusi serta efek jera terhadap pengungsi yang sering mengendarai motor.</p>	02 Oktober 2023
7.	<p>Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar yang Mengendarai Kendaraan Bermotor tanpa Memiliki SIM, Rapat dibuka oleh Ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, Kegiatan ini dihadiri oleh Kasatgas PPLN Kota Makassar, Satintelkam Polrestabes Makassar, Satlantas Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, Kesbangpol Kota Makassar dan Dinsos Kota Makassar, yang membahas persoalan banyaknya pengungsi yang mengendarai motor tanpa Sim dan mencari Solusi serta efek jera terhadap pengungsi yang masih sering mengendarai motor.</p>	09 Oktober 2023
8.	<p>Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar, Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan, kegiatan ini dihadiri oleh Satgas PPLN Kota Makassar yang terdiri dari Kesbangpol Kota Makassar, Wakasat Intelkam Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, Satpol PP dan Dinsos Kota Makassar, kegiatan ini bertujuan mencari Solusi dari masih banyaknya permasalahan yang diakibatkan pengungsi dan sekaligus rapat ini memperkenalkan Ka Rudenim Makassar yang baru</p>	02 November 2023

9.	Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Kota Makassar, Kegiatan ini dibuka oleh Sekertaris Kesbangpol Kota Makassar, kegiatan ini dihadiri oleh Satgas PPLN Kota Makassar yang terdiri dari Kasat Intelkam Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, dan Dinsos Kota Makassar, kegiatan ini membahas tentang rencana pengurangan 5 Community House yang dianggap tidak layak	03 November 2023
10.	Kegiatan Rapat Koordinasi Sinergi Pelaksanaan Pengawasan Pemberangkatan Orang Asing (Imigran Ilegal/deportee) yang melalui bandara internasional sultan hasanuddin , kegiatan ini dibuka oleh ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan yang dihadiri oleh Kepala Kanim Kelas I Makassar, UNHCR, Kesbangpol, BIN Daerah Sulsel, dan Pihak Airlines, kegiatan ini bertujuan bahwa seluruh kegiatan pengawasan dan deportasi tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik dari stakeholder terkait maka dari itu dibutuhkan adanya sinergi dari stakeholder.	10 November 2023
11.	Kegiatan Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kota Makassar Bersama Pengelola Community House Pengungsi, Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Rita Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan yang dihadiri Oleh Kesbangpol Kota Makassar, Pengelola/Pemilik Community House, Wakasat Intel Polrestabes Makassar, IOM, UNHCR, Satpol PP dan Dinso Kota Makassar, Kegiatan Ini bertujuan untuk menyampaikan perlunya komunikasi aktif dari seluruh pengelola Community House kepada Satgas PPLN.	04 Desember 2023

- Adanya Perbedaan Jumlah data Pengungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Data Pengungsi *Internasional Organizatio for Migrant (IOM)* Makassar disebabkan adanya perbedaan update dalam hal waktu dan metode update data. Selain hal tersebut terdapat pengungsi mandiri yang terdaftar pada IOM Makassar, namun belum sepenuhnya terdata di Rudenim Makassar.

**SASARAN KEGIATAN
TERWUJUDNYA KEPUASAN INTERNAL DI
WILAYAH**

Indeks kepuasan Internal pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2023 adalah Untuk mengetahui sampai sejauh mana kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam organisasi kepada pegawai atau unit organisasi lain, telah mampu memberikan kepuasan dalam memberikan pelayanan.

Survei kepuasan pengguna Internal Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi *survei.balitbangham.go.id* yang metode pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel III.15 Tabel hasil Indeks Kepuasan Internal Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

NO	UPT	JUMLAH PEGAWAI	2022							
			TRI I	RES	TRI II	RES	TRI III	RES	TRI IV	RES
1.	RUDENIM MAKASSAR	65	94,44 SANGAT BAIK	52	96,09 SANGAT BAIK	34	96,05 SANGAT BAIK	34	97,12 SANGAT BAIK	3

NO	UPT	JUMLAH PEGAWAI	2023							
			TRI I	RES	TRI II	RES	TRI III	RES	TRI IV	RES
1.	RUDENIM MAKASSAR	63	96,61 SANGAT BAIK	41	97,02 SANGAT BAIK	39	95,02 SANGAT BAIK	31	96,87 SANGAT BAIK	52

Tabel III.16 Tabel capaian indeks kepuasan Semester II Tahun 2023

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan internal	3,13	3,65	117%

Rumus Capaian:

% Capaian =	Realisasi Kepuasan Internal	X	100%
	Target Kepuasan Internal		
=	3.65	X	100%
	3.13		
=	117%		

1. Perbandingan Realisasi dan Capaian IPK Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.17 Perbandingan capaian indeks kepuasan Internal Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2023

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023	2022	Semester II 2023
Indeks kepuasan internal	3,12	3,13	3,84	3,65	123%	117%

Capaian IPK terhadap Layanan Internal Tahun 2022 sebesar 3,84 dari target 3,12 atau sekitar 123% sedangkan untuk semester II Tahun 2023 sebesar 3,65 dari target 3,13 atau sekitar 117%, Realisasi yang dicapai pada Tahun 2022 maupun Semester II Tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam rencana strategis, Target Semester II tahun 2023 telah terlampaui, Target kinerja untuk indeks kepuasan Internal tahun 2021 adalah 3,90 dari target 3,11, Target kinerja untuk indeks Kepuasan Internal tahun 2022 adalah 3,84 dari target 3,12, Target kinerja untuk indeks kepuasan Internal Semester II tahun 2023 adalah 3,65 dari target 3,13 dan Target kinerja untuk indeks kepuasan Internal di wilayah tahun 2024 adalah 3,14.

Tabel III .18 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

INDIKATOR KINERJA	TARGET			
	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

Analisis :

Rumah Detensi Imigrasi Makassar dengan wilayah Kerja 5 Provinsi tidak berbanding dengan jumlah pegawai yang awalnya 65 (enam puluh lima) orang sekarang hanya tinggal 63 (enam puluh tiga) orang, karena 2 (dua) orang telah pindah tugas, ditambah 1 (satu) orang sedang tugas belajar di poltekim dan 5 (lima) orang sementara BKO di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ditambah masih adanya pegawai yang masih gagap teknologi menyebabkan terhambatnya pekerjaan yang diperintahkan jika menggunakan PC atau Laptop, Rumah Detensi Imigrasi Makassar belum dapat mengikuti kontestasi penilaian Satuan Kerja berpredikat WBK, berdasarkan hasil penilaian ITJEN Kemenkumham dan HAM RI diakibatkan masih kurangnya pemenuhan data dukung dan masih rendahnya komitmen pegawai dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi., Namun demikian, untuk menunjang organisasi tetap berjalan, maka perlu memaksimalkan sumber daya yang ada agar tugas dan fungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar tetap berjalan dengan baik, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai juga diperlukan untuk peningkatan kualitas kerja, pengembangan kompetensi pegawai juga diperlukan agar sumber daya manusia di Rudenim juga bisa bersaing dengan unit pelaksana teknis yang lain, pemberian reward dan punishment juga diperlukan untuk menambah semangat kerja pegawai yang diberi Reward dan untuk pembelajaran untuk tidak mengulangi perbuatannya pada pegawai yang diberi punishment.

Kegiatan Pengelolaan sumber daya Rumah Detensi Semester II Tahun 2023 :

- a. Coaching dan Mentoring kepada Pegawai setiap awal bulan berupa pemahaman TUSI;
- b. Sosialisasi Service Excellent untuk peningkatan kualitas pelayanan setiap triwulan kepada seluruh pegawai Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

B. Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Semester II Tahun 2023 sebagai berikut

:Tabel III.19 Serapan anggaran

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,498,446,000	3,494,712,081	99,89%
Belanja Barang	4,458,597,000	4,456,806,779	99,96%
Belanja Modal	2,195,368,000	2,187,683,325	99.65%

Tabel III.20 Perbandingan serapan anggaran

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
TAHUN 2022				
Belanja Pegawai	3.555,417,000	3,547,760,705	7,656,295	99,78%
Belanja Barang	3,240,907,000	3,233,580,033	7,326,967	99,77%
Belanja Modal	155,889,000	154,539,700	1,349,300	99,13%
TOTAL	6,952,213,000	6,935,880,438	16,332,562	99,77%
SEMESTER II TAHUN 2023				
Belanja Pegawai	3,498,446,000	3,494,712,081	3,733,919	99,89%
Belanja Barang	4,458,597,000	4,456,806,779	1,790,221	99,96%
Belanja Modal	2,195,368,000	2,187,683,325	7,684,675	99,65%
TOTAL	10,152,411,000	10,139,202,185	13,208,815	99,87%

Tabel III.21 Penyerapan Anggaran per Jenis Kegiatan

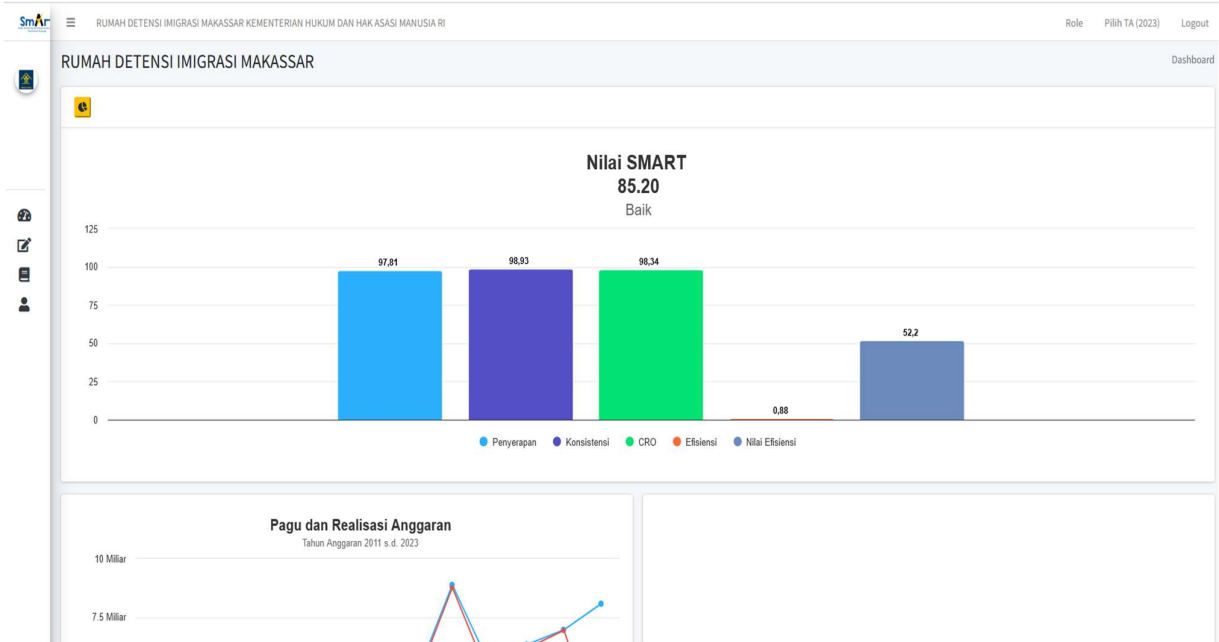
KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1,651,594,000	1,650,667,696	99,94%
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	8,500,817,000	8,488,534,489	99,85%
TOTAL	10,152,411,000	10,139,202,185	99,87%

C. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kerja Pada Aplikasi SMART DJA

Nilai evaluasi kinerja pada aplikasi SMART Kemenkeu pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, memperoleh nilai efisiensi rata 85,20% , angka ini menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah memperoleh nilai Baik dalam mencapai hasil kinerja pada semester II Tahun 2023, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait perolehan SMART.

- **CAPTURE SMART**



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II Tahun 2023

Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi IKPA Kemenkeu pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, memperoleh nilai efisiensi sebesar 98,11%, angka ini menunjukkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi Makassar telah memperoleh nilai Baik dalam mencapai hasil kinerja pada semester II Tahun 2023, selanjutnya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi terkait perolehan IKPA.

- **CAPTURE IKPA**

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN				KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PERVARIAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PEMILEHAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	
1	136	013	664475	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	Nilai	100.00	92.14	100.00	94.88	100.00	96.26	100.00	0.00	73.28	100%	73.28
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.21	20.00	9.44	10.00	9.63	5.00	0.00			
					Nilai Aspek	95.07			98.13				0.00			

D. Capaian Kinerja Lainnya

- 1) Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-performance) yang Bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja, aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan, Aplikasi ini diisi setiap bulannya dengan target dan realisasi yang diperoleh berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar.

• CAPTURE E-PERFORMANCE

The screenshot displays the 'E-PERFORMANCE' web application interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Dashboard', 'BSC', 'Input Data', 'Perencanaan', 'Realisasi', 'Lainnya', 'Ubah Password', and 'Keluar'. The main header features the 'E-PERFORMANCE' logo and the text 'SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA'. Below the header, there are filters for 'TAHUN' (2023) and 'UNIT KERJA' (RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR). A search bar with 'Tampilkan' and 'Tambah' buttons is present. The main content area is titled 'PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR' and contains a table with the following columns: NO, SASARAN, STRATEGIS, NO, INDIKATOR KINERJA, KASKADING (KELUAR, MASUK), WAKTU PENYELESAIAN, JUMLAH, SATUAN, JUMLAH (%), REALISASI, LAMPIRAN, CATATAN MONITORING, BOBOT, and SCORE(N).

NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	KASKADING		TARGET			REALISASI		LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BOBOT	SCORE(N)
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN				
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan tugas dan fungsi imigrasi di Wilayah		1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai:			3,25 Indeks Triwulan IV	Triw	11,58	Indeks	0			0	0
<p>Januari: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan Januari sebesar 3,88 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 15 response.</p> <p>Februari: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan Februari sebesar 3,80 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 28 response.</p> <p>Maret: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan Maret sebesar 3,90 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 32 response.</p> <p>April: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan April sebesar 3,80 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 33 response.</p> <p>Mei: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan Mei sebesar 3,83 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 27 response.</p> <p>Juni: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah pada bulan Juni sebesar 3,82 dengan nilai mutu A dan jumlah response sebanyak 40 response.</p>															
<p>Juli: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan Juli Sebesar 3,90 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 30 Response</p> <p>Agustus: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan Agustus Sebesar 3,91 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 29 Response</p> <p>September: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan September Sebesar 3,90 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 18 Response</p> <p>Oktober: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan Oktober Sebesar 3,84 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 32 Response</p> <p>November: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan November Sebesar 3,88 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 22 Response</p> <p>Desember: Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Pada Bulan Desember Sebesar 3,84 Dengan Nilai Mutu A dan Jumlah Response Sebanyak 41 Response</p>															
			2	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah Sasaran Kinerja Pegawai:			3,13 Indeks Triwulan IV	Triw	55	Indeks	0			0	0
<p>Januari: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 5 Orang, Restorasi = 9 Orang.</p> <p>Februari: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 11 Orang, Deportasi = 3 Orang, Pemindahan ke Luar = 11 Orang, Restorasi = 11 Orang, Pengungsi Pindah ke Makassar = 0 Orang, Rapat Timor-Leste.</p> <p>Maret: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 4 Orang, Restorasi = 19 Orang, Pengungsi Pindah ke Makassar = 4 Orang.</p> <p>April: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 1 Orang, Restorasi = 4 Orang.</p> <p>Mei: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 6 Orang, Deportasi = 2 Orang, Pemindahan ke Luar = 6 Orang, Restorasi = 3 Orang, Pengungsi Pindah ke Makassar = 20 Orang, Juni: Telah terlaksana kegiatan pengamanan keimigrasian di wilayah antara lain: Pendestasan = 6 Orang, Pemindahan ke Luar = 8 Orang, Restorasi = 2 Orang.</p> <p>Juli: Pendestasan = 2 Orang, Pemindahan ke Luar = 25 Orang, Restorasi = 14 Orang, Pengungsi Pindah ke Makassar = 1 Orang.</p> <p>Agustus: Pendestasan = 7 Orang, Pemindahan ke Luar = 9 Orang, Restorasi = 50 Orang, Pengungsi Pindah ke Makassar = 8 Orang.</p>															



BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar adalah rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Tahun 2023, Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
- b. Pemanfaatan aplikasi e-performance harus lebih maksimal dengan menambahkan fitur-fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

B. Saran

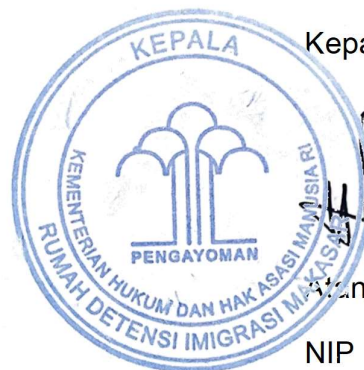
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan capaian kinerja yang optimal perlu dilakukan kajian, analisa, dan evaluasi melalui kegiatan monitoring, pengendalian dan pembinaan secara konsisten dan berkesinambungan dari jajaran atas kepada jajaran bawah;



2. Membuat suatu sistem berbasis teknologi informasi dengan mengoptimalkan system informasi yang telah ada guna memudahkan monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas sehingga capaian kinerja yang optimal, efektif, efisien dan berdaya guna serta berhasil guna dapat terpenuhi;
3. Meningkatkan Koordinasi antar seksi/bagian dilingkungan Rudenim Makassar dan Instansi terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan;
4. Inventarisasi masalah-masalah yang terjadi dalam penanganan deteni guna optimalisasi pelayanan dan pengendalian serta penegakan hukum yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar Semester II Tahun 2023 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar akan semakin baik dalam hal pelayanan terhadap Masyarakat, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat akan semakin meningkat dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.



Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Atung Kuswana

NIP 196706151995031002



• LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 8 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Alimuddin
NIP. 19680826 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,2 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	85,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	90,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,12 Indeks
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan




No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks
		2. Jumlah layanan perkantoran	1 layanan
		3. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	11 Unit
		4. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	6 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 821.448.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 821.448.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.832.930.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 5.832.930.000,-

Makassar, 8 Maret 2022

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberty Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Alimuddin
NIP. 19680826 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 8 Maret 2022

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Alimuddin

NIP. 19680826 199403 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Liberti Sitinjak
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan


Liberti Sitinjak
NIP. 196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar


Alimuddin
NIP.196808261994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR DENGAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,25 (Indeks)
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	87
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,25 (Indeks)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,13 (Indeks)
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Layanan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjen Imigrasi	1 Layanan

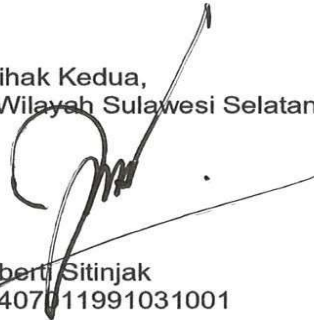


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah 2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 (Indeks) 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 1.651.594.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 1.651.594.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.420.804.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.420.804.000,-

Makassar, 18 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan



Liberty Sitinjak
NIP.196407011991031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar



Alimuddin
NIP.196808261994031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alimuddin
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 18 Januari 2023

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Alimuddin
NIP.196808261994031001

- **Prestasi**

Gambar 1 : **Piagam Penghargaan PLT Direktur Jenderal Imigrasi**



Atas prestasinya sebagai satuan kerja dengan Nilai Pengelolaan dan Pelaporan Laporan Harian Inteligen (LHI) Terbaik II Tahun 2021 kategori Rumah Detensi Imigrasi. dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi ke-72 Tahun 2022

Gambar 2 : **Piagam Penghargaan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi**

Atas prestasinya sebagai satuan kerja Rumah Detensi Imigrasi dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik III Periode Januari s.d Mei T.A 2022



Gambar 3 : Piagam Penghargaan Kepala Kanwil Sulawesi Selatan



*Atas prestasinya sebagai Unit Pelaksana
Teknis Terbaik VIII pada Evalasi Capaian
Kinerja Tahun 2022*

Gambar 4 : Piagam Penghargaan dari Kepala Dinas Kota Makassar

**Atas Prestasinya sebagai instansi yang
Informatif dan responsive dalam
Mendukung keberhasilan penanganan
Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Makassar**



Gambar 5 : Piagam Penghargaan dari Pimpinan IOM Regional Makassar



Sebagai Mitra Kerja yang berperan aktif dalam pengawasan keimigrasian, sehingga mendukung keberhasilan penanganan pengungsi luar negeri di kota makassar